

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KARO MENURUT PENGELUARAN 2015 - 2019



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KARO MENURUT PENGELUARAN 2015 - 2019



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KARO MENURUT PENGELUARAN
2015-2019**

Nomor ISBN : 978-602-6738-65-3602
Nomor Publikasi : 12110.2004
Katalog : 930202.1211
Ukuran Buku : 21 X 29,7 cm
Jumlah Halaman : viii + 73 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo
Penyunting : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo
Desain Kover oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo
Diterbitkan oleh : © BPS Kabupaten Karo
Dicetak oleh : CV. E'Karya

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

TIM PENYUSUN

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KARO
MENURUT PENGELUARAN**

2015 – 2019

Penanggung Jawab Umum
Yustinus Sembiring, SE.MM

Koordinator
Penanggung Jawab Teknis
Budi Simamora, SE. MM

Editor
Budi Simamora, SE. MM

Penulis
Ulasan
Gambar Kulit
Tata Letak
Gambar Grafik dan Infografis
Quarthano Reavindo, S.Si

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor serta Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Berastagi, Mei 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Karo


Yustinus Sembiring, SE. MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
I BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB.....	6
II BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT).....	13
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT).....	15
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P).....	17
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	20
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)	23
2.6 EKSPOR - IMPOR	26
III BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KARO MENURUT PDRB PENGELUARAN 2014 - 2018.....	27
3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	29
3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN	37
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga.....	37
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT.....	41
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah	41
3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	44
3.2.5. Perubahan Inventori.....	45
3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa	47
3.2.7. Impor Barang dan Jasa.....	48
IV BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN KARO	51
4.1 PDRB (NOMINAL).....	53
4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB	54
4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)	55
V BAB V PENUTUP	57
VI LAMPIRAN	61
VII DAFTAR PUSTAKA	71

PENDAHULUAN

1

Komponen PDRB Pengeluaran



Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga



Pembentukan Modal
Tetap Bruto

Pengeluaran Konsumsi
LNPRM



Perubahan
Inventori



Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah



Ekspor

Impor



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat.

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Pereengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS

- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang

diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} &= \text{Output} - \\ &\quad \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ &\quad \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ &\quad \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan

2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;

3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : $\text{PMTB atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi : $\text{PMTB atas dasar harga Konstan (t)} = \text{PMTB atas dasar harga (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$

<https://karokab.bps.go.id>

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. **Metoda Revaluasi**

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume nventori (t) - Volume inventori (t-1)) × Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. **Metoda Deflasi**

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan × IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

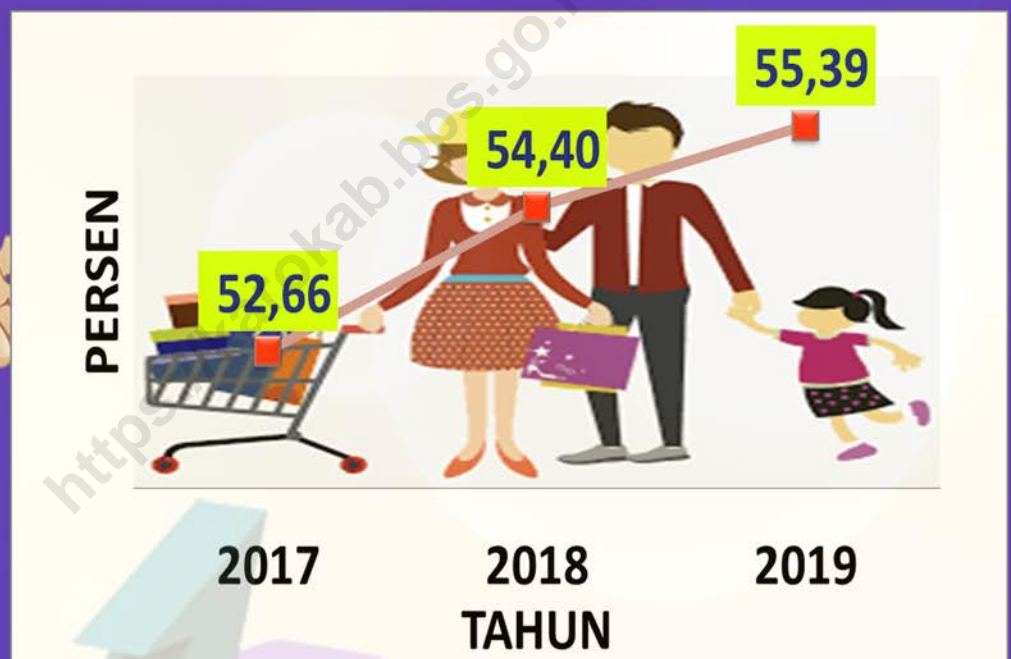
iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

TINJAUAN PEREKONOMIAN

3

Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Kara 2017 - 2019



Dalam tiga tahun terakhir
PDRB Kabupaten Kara sebagian besar
digunakan untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT)

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku di tahun 2019 meningkat sebesar 7,10 %, yakni dari 19.220,88 miliar Rupiah menjadi 20.584,73 miliar Rupiah (2010=100). Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, maka peningkatannya yakni dari 13.744,17 miliar Rupiah menjadi 14.376,28 miliar Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 4,60 %.

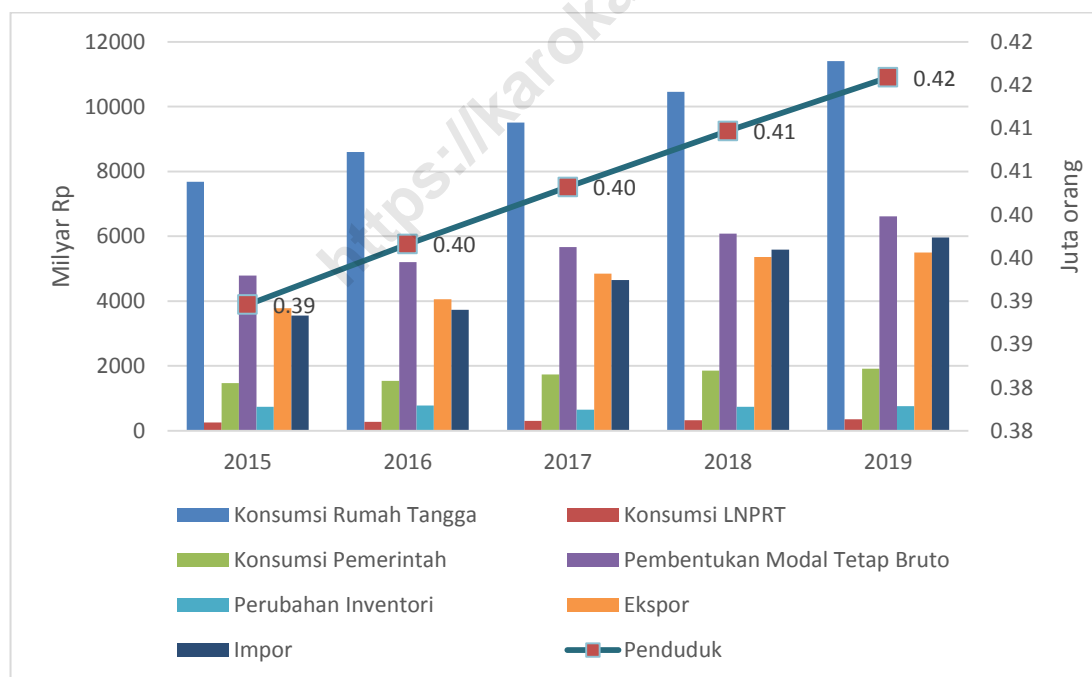
Perekonomian Kabupaten Karo periode 2015 - 2019 dapat tetap tumbuh meningkat menjadi di atas 4 %, yakni 5,01 %; 5,17 %; 5,21 %; 4,55 % dan 4,60 %. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kabupaten Karo didominasi oleh komponen Konsumsi LNPRRT yang tumbuh mencapai **9,14 persen**. Sedangkan dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Perdagangan.

Pada periode tahun 2015 - 2019 PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 15.150,36 miliar Rupiah (2015); 16.728,46 miliar Rupiah (2016); 18.064,32 miliar Rupiah (2017); 19.220,88 miliar Rupiah (2018); dan 20.584,73 miliar Rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Karo pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

**Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Karo
2015 - 2019 (Miliar Rp)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, Konsumsi Rumah Tangga	7 676,61	8 603,83	9 512,12	10 457,10	11 402,09
2, Konsumsi LNPRT	252,82	277,18	302,09	325,07	356,51
3, Konsumsi Pemerintah	1 466,92	1 539,23	1 734,35	1 848,67	1 913,00
4, Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 791,34	5 197,59	5 667,92	6 078,94	6 614,59
5, Perubahan Inventori	737,96	780,37	652,50	740,72	760,16
6, Ekspor	3 779,72	4 059,60	4 846,40	5 360,46	5 496,53
7, Impor	3 555,00	3 729,33	4 651,05	5 590,10	5 958,14
PDRB	15 150,36	16 728,46	18 064,32	19 220,88	20 584,73

**Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Karo
2015 - 2019**



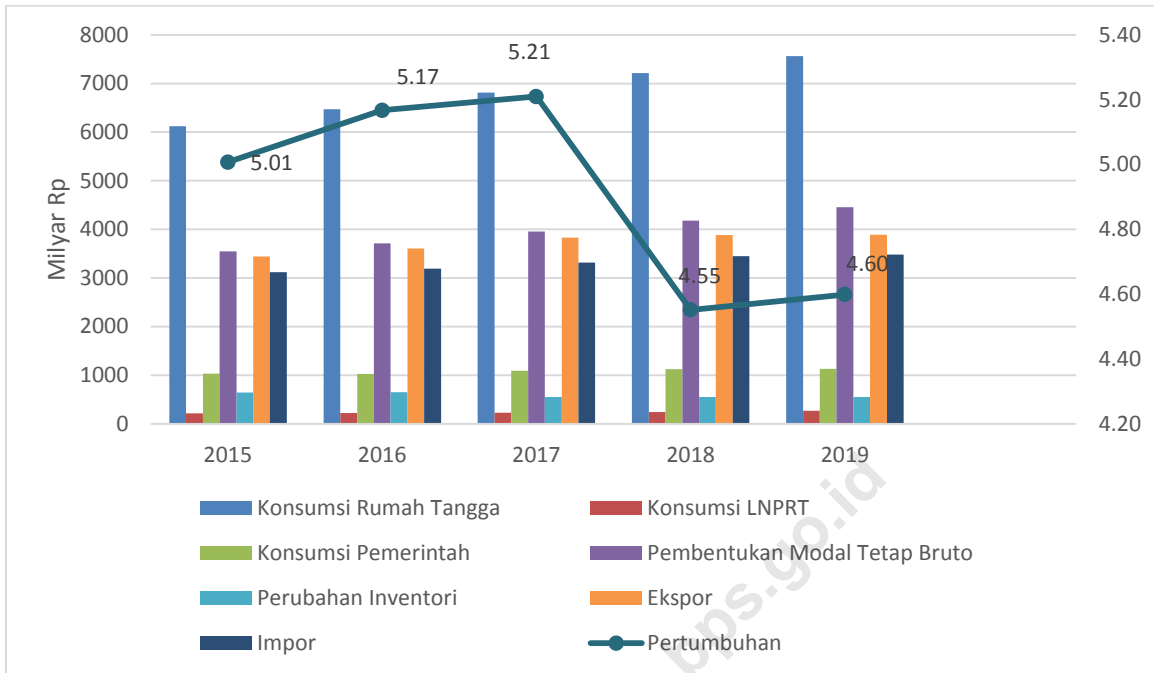
Selain dinilai atas dasar harga Berlaku PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010, Melalui pendekatan ini nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga), PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Karo pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Karo 2015 - 2019 (Miliar Rp)

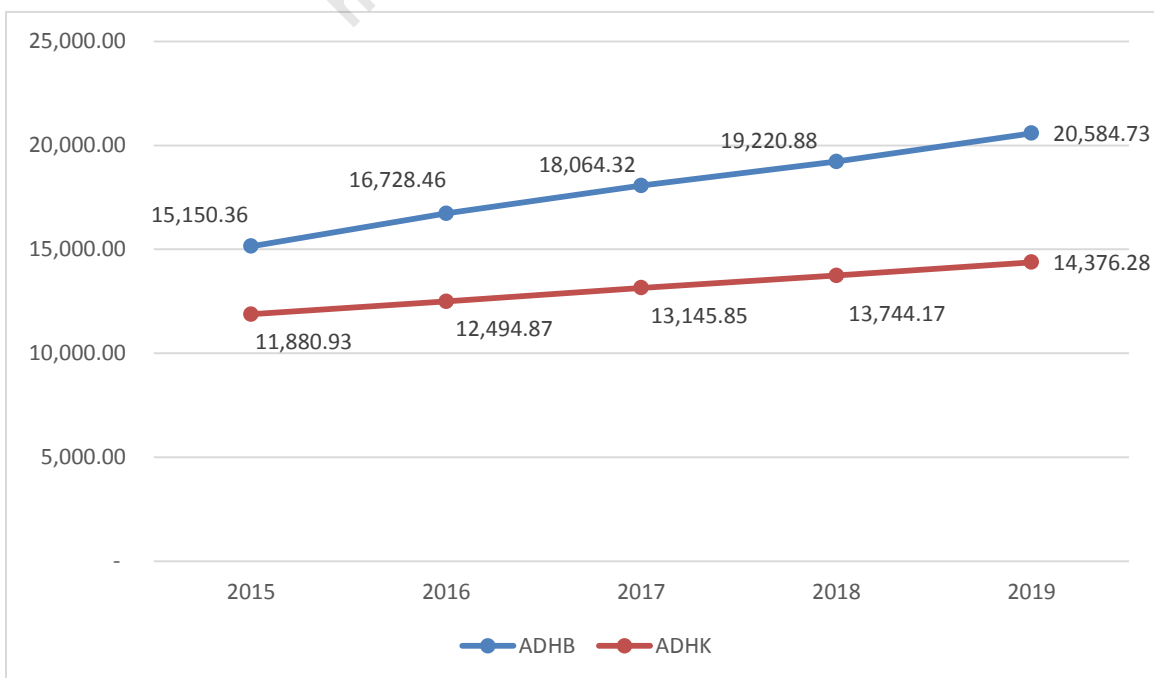
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, Konsumsi Rumah Tangga	6 123,45	6 468,40	6 810,77	7 215,17	7 563,64
2, Konsumsi LNPR	217,31	223,21	229,36	242,85	265,04
3, Konsumsi Pemerintah	1 028,67	1 024,15	1 091,71	1 123,42	1 130,13
4, Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 546,25	3 713,20	3 952,95	4 177,48	4 458,01
5, Perubahan Inventori	645,99	651,81	548,02	550,74	553,47
6, Ekspor	3 440,59	3 607,60	3 830,19	3 883,79	3 887,38
7, Impor	3 121,33	3 193,52	3 317,15	3 449,27	3 481,40
PDRB	11 880,93	12 494,87	13 145,85	13 744,17	14 376,28

Dari tabel 2 terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Karo meningkat yakni 11,881 triliun Rupiah (2015); 12,495 triliun Rupiah (2016); 13,146 triliun Rupiah (2017); 13,744 triliun Rupiah (2018) dan 14,376 triliun Rupiah (2019). Sedangkan dari grafik 2 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo cenderung berfluktuatif dan meningkat yakni dari 4,55 persen pada tahun 2018 menjadi 4,60 persen pada tahun 2019.

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Karo 2015 - 2019



Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Karo 2015-2019



Dari grafik 3 terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan, sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

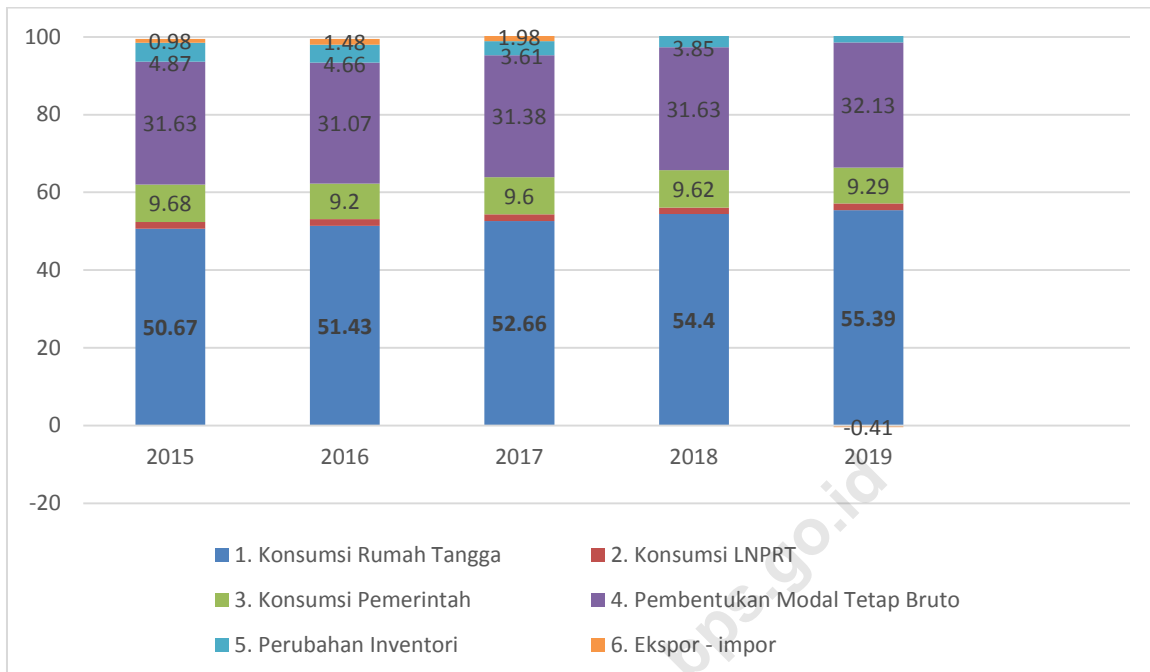
Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Karo 2015 - 2019 (persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, Konsumsi Rumah Tangga	50,67	51,43	52,66	54,40	55,39
2, Konsumsi LNPRT	1,67	1,66	1,67	1,69	1,73
3, Konsumsi Pemerintah	9,68	9,20	9,60	9,62	9,29
4, Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,63	31,07	31,38	31,63	32,13
5, Perubahan Inventori	4,87	4,66	3,61	3,85	3,69
6, Ekspor	24,95	24,27	26,83	27,89	26,70
7, Impor	23,46	22,29	25,75	29,08	28,94
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT). Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2015-2019 PDRB Kabupaten Karo sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) yakni sekitar 50,67 s.d 55,39. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal Tetap Bruto (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar yakni sekitar 31,07 s.d 32,13 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 24,27 s.d 27,89 persen namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar yakni sekitar 22,29 s.d 29,08 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Karo 2015 - 2019



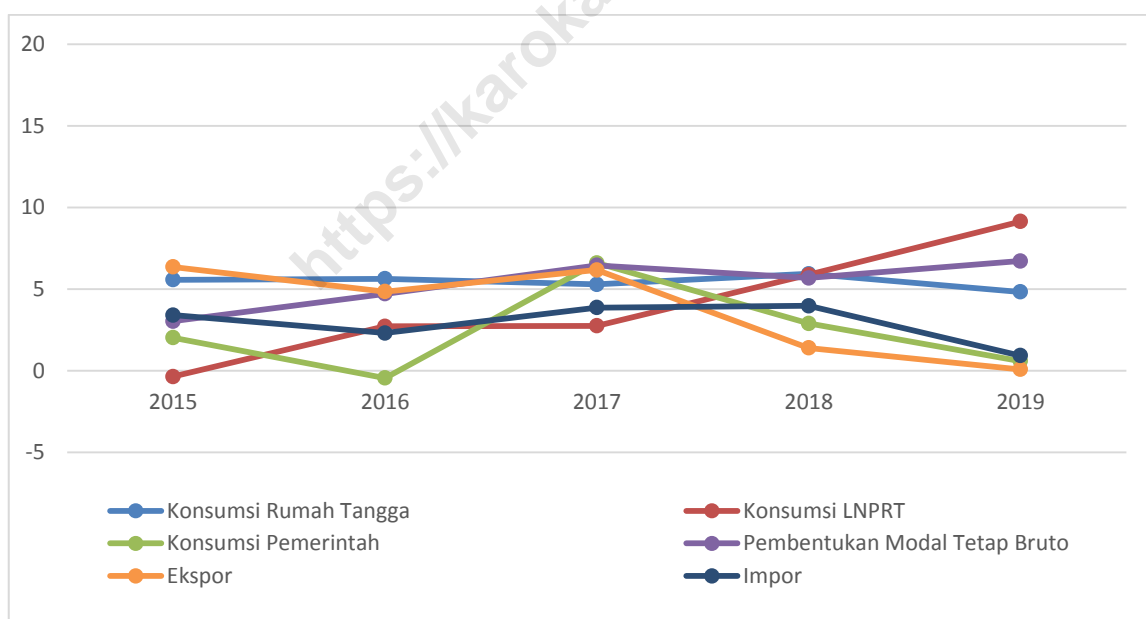
Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 9,20 – 9,68 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2019 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “tidak surplus” atau berkurang.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4 selama periode tahun 2015 – 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung berfluktuatif yakni sebesar 5,01 persen (2015); 5,17 persen (2016); 5,21 persen (2017); 4,55 persen (2018); dan 4,60 persen (2019). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Karo
2014 - 2018(persen)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, Konsumsi Rumah Tangga	5,58	5,63	5,29	5,94	4,83
2, Konsumsi LNPRT	(0,35)	2,72	2,75	5,88	9,14
3, Konsumsi Pemerintah	2,03	(0,44)	6,60	2,90	0,60
4, Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,04	4,71	6,46	5,68	6,72
5, Perubahan Inventori	2,50	0,90	(15,92)	0,50	0,49
6, Ekspor	6,36	4,85	6,17	1,40	0,09
7, Impor	3,41	2,31	3,87	3,98	0,93
PDRB	5,01	5,17	5,21	4,55	4,60

**Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Karo
2015 - 2019 (persen)**



Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumahtangga LNPRT pemerintah dan perusahaan) akhir barang dan jasa baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi investasi maupun ekspor/impor, Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2015 – 2019 baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Karo
2015 - 2019 (Miliar Rp)**

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, Konsumsi Rumah Tangga	125,36	133,01	139,66	144,93	150,75
2, Konsumsi LNPRT	116,34	124,18	131,71	133,86	134,51
3, Konsumsi Pemerintah	142,60	150,29	158,87	164,56	169,27
4, Pembentukan Modal Tetap Bruto	135,11	139,98	143,38	145,52	148,38
5, Perubahan Inventori	114,24	119,72	119,07	134,50	137,35
6, Ekspor	109,86	112,53	126,53	138,02	141,39
7, Impor	113,89	116,78	140,21	162,07	171,14
PDRB	127,52	133,88	137,41	139,85	143,19

**Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Karo
2015 - 2019 (Miliar Rp)**

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, Konsumsi Rumah Tangga	2,86	2,90	2,74	3,08	2,54
2, Konsumsi LNPRT	(0,01)	0,05	0,05	0,10	0,16
3, Konsumsi Pemerintah	0,18	(0,04)	0,54	0,24	0,05
4, Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,92	1,41	1,92	1,71	2,04
5, Perubahan Inventori	0,14	0,05	(0,83)	0,02	0,02
6, Ekspor	1,82	1,41	1,78	0,41	0,03
7, Impor	0,91	0,61	0,99	1,01	0,23
PDRB	5,01	5,17	5,21	4,55	4,60

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga LNPRT dan pemerintah sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Karo untuk periode 2015 – 2019.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Karo ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Karo maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara asrama dan lain-lain). Selanjutnya berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*) yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015 – 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga
Kabupaten Karo
2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	7 676,61	8 603,83	9 512,12	10 457,10	11 402,09
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	6 123,45	6 468,40	6 810,77	7 215,17	7 563,64
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	50,67	51,43	52,66	54,40	55,39
Rata-rata konsumsi per- rumah tangga (Ribu Rp)					
a. ADHB	73 141,92	80 528,54	87 570,84	94 750,15	102 129,91
b. ADHK 2010	58 343,58	60 541,73	62 701,57	65 375,53	67 748,45
Rata-rata konsumsi per- Kapita (Ribu Rp)					
c. ADHB	19 704,28	21 694,08	23 591,16	25 525,36	27 416,91
d. ADHK 2010	15 717,64	16 309,71	16 891,50	17 611,94	18 187,16
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	5,58	5,63	5,29	5,94	4,83
b. Perkapita	3,69	3,77	3,57	4,27	3,27
Jumlah rumah tangga	104 955	106 842	108 622	110 365	111 643
Jumlah penduduk (orang)	389 591	396 598	403 207	409 675	415 878

Dalam kurun waktu 2015 – 2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB selalu berfluktuatif yaitu 50,67 persen (2015); 51,43 persen (2016); 52,66 persen (2017); 54,40 persen (2018); dan 55,39 persen (2019). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 55,39 persen dan terendah pada tahun 2015 sebesar 50,67persen.

Pada masa pemulihan ekonomi biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015, setiap rumahtangga di Kabupaten Karo menghabiskan dana sekitar 73,142 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 80,529 juta rupiah (2016); 87,571 juta rupiah (2017) ; 2018 mencapai 94,750 juta rupiah dan di tahun 2019 telah mencapai 102,130 juta rupiah. Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga pada tahun 2019 sebesar 67,748 juta rupiah naik dibanding tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 sebesar 65,375 juta rupiah.

Di sisi lain kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk, Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 3,27 s.d 4,27 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga
Kabupaten Karo
2015 – 2019⁶ (persen)**

Kelompok Konsumsi	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	47,94	47,36	46,86	47,01	47,35
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,62	5,70	5,75	5,81	5,86
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,22	13,33	13,48	13,59	13,25
d. Kesehatan & Pendidikan	5,75	5,86	6,05	6,10	6,07
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	16,87	17,12	16,93	16,77	16,81
f. Hotel & Restoran	6,18	6,20	6,20	6,22	6,49
g. Lainnya	4,41	4,73	4,42	4,51	4,17
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Pada tahun 2015 pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 5,58 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 5,63 persen (2016)); 5,29 persen (2017); 5,94 persen (2018) dan di tahun 2019 sebesar 4,83 persen . Sementara itu rata-rata pertumbuhan konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 3,69 persen (2015) ; 3,77 persen (2016); 3,57 persen (2017); 4,27 persen (2018) dan 3,27 persen (2019). Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Sementara itu tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8 menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga, Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6 94 persen pada harga kelompok perumahan perkakas perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga dan transportasi komunikasi rekreasi dan budaya Hal ini diakibatkan oleh pola konsumsi rumah tangga akan kelompok tersebut sangat dibutuhkan,

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Karo 2015 – 2019⁷ (Juta Rp)

Kelompok Konsumsi	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,66	5,64	4,09	3,36	2,06
b. Pakaian dan Alas Kaki	6,63	6,81	5,96	4,33	3,67
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,09	7,46	5,14	5,43	5,47
d. Kesehatan & Pendidikan	4,63	7,24	7,33	4,38	6,62
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,02	5,58	4,12	3,50	7,06
f. Hotel & Restoran	5,57	7,44	5,34	5,88	8,47
g. Lainnya	6,63	4,67	12,76	0,24	1,84
Total Konsumsi	4,89	6,10	5,00	3,77	4,01

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT
Kabupaten Karo
2015 - 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	252,82	277,18	302,09	325,07	356,51
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	217,31	223,21	229,36	242,85	265,04
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,67	1,66	1,67	1,69	1,73
Pertumbuhan (ADHK 2010)	(0,35)	2,72	2,75	5,88	9,14

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2015 konsumsi LNPRT sebesar 252,82 miliar rupiah kemudian pada tahun-tahun berikutnya 277,18 miliar rupiah (2016), 302,09 miliar rupiah (2017), 325,07 miliar rupiah (2018) dan 356,51 miliar rupiah (2019). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah -0,35 persen (2015), 2,72 persen (2016), 2,75 persen (2017), 5,88 persen (2018), dan 9,14 persen (2019). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif, Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity* yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah, b) *Excludable consumption* yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga), c) *Rivalrous competition* yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal

serupa, Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri,

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry* yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut, b) *Non excludable* yaitu apabila suatu barang publik tersedia maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut, Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Kabupaten Karo 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1 466,92	1 539,23	1 734,35	1 848,67	1 913,00
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1 028,67	1 024,15	1 091,71	1 123,42	1 130,13
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	9,68	9,20	9,60	9,62	9,29
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	3 765,28	3 881,08	4,301.39	4 512,53	4 599,91
b. ADHK 2010	2 640,38	2 582,34	2 707,57	2 742,22	2 717,46
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	228 385,49	239 643,47	286 574,69	313 599,66	331 542,46
b. ADHK 2010	160 154,13	159 450,41	180 388,30	190 571,67	195 863,08
Pertumbuhan ⁸					
a. Total konsumsi pemerintah	2,03	-0,44	6,60	2,90	0,60
b. Konsumsi perkapita	0,21	-2,20	4,85	1,28	-0,90
c. Konsumsi per-pegawai pemerintah	-0,38	-0,44	13,13	5,65	2,78
Jumlah Pegawai Pemerintah⁹	6 423	6 423	6 052	5 895	5 770
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	389 591	396 598	403 207	409 675	415 878

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

⁹ Tidak termasuk polisi, militer dan PNS Pusat

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 kecuali pada tahun 2016 terjadi penurunan untuk harga konstan. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1,47 triliun rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1,54 triliun rupiah (2016), 1,73 triliun rupiah (2017), 1,85 triliun rupiah (2018) dan 1,91 triliun rupiah (2019). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun namun pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 1,03 triliun rupiah (2015) menjadi 1,02 triliun rupiah (2016), dan kembali meningkat pada tahun 2017 – 2019 yakni masing-masing menjadi 1,09 triliun rupiah, 1,12 triliun rupiah, dan 1,13 triliun.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami penurunan dari 9,68 persen (tahun 2015) dan 9,29 persen (tahun 2019), Sepanjang periode tersebut proporsi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 9,20 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena proporsi pada beberapa komponen mengalami peningkatan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik) meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 3,765 juta rupiah terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu yaitu menjadi 3,881 juta rupiah (2016) ; 4,301 juta rupiah (2017) ; 4,512 juta rupiah (2018) dan mencapai 4,599 juta rupiah pada tahun 2019.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya dengan masing-masing senilai 2,640 juta rupiah (2015); 2,582 juta rupiah (2016) ; 2,708 juta rupiah (2017) ; 2,742 juta rupiah (2018) dan 2,717 juta rupiah (2019).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 228,386 juta rupiah kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 239,643 juta rupiah (2016) ; 286,575 juta rupiah (2017) ; 313,600 juta rupiah (2018); dan 331,542 juta rupiah (2019).

Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan fluktuasi dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 13,13 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan fluktuasi (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) sejalan juga jumlah pegawai pemerintah yang juga mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2015 s.d 2019 jumlah pegawai pemerintah berfluktuasi dengan jumlah pada masing-masing tahun sebesar 6.423 orang (2015 dan 2016); 6.052 orang (2017); 5.895 orang (2018) dan 5.770 orang (2019).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 6,60 persen; untuk konsumsi per-kapita 4,85 persen pada; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan mencapai 13,13 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik), Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹⁰. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2015 - 2019 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan tiap tahun adalah sebagai berikut: 3,04 persen (2015); 4,71 persen (2016); 6,46 persen (2017) 5,68 persen (2018); dan 6,72 persen (2019).

¹⁰ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Karo
2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	4 791,34	5 197,59	5 667,92	6 078,94	6 614,58
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	3 546,25	3 713,20	3 952,95	4 177,48	4 458,01
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	31,63	31,07	31,38	31,63	32,13
Struktur PMTB ¹¹					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	3 466,12	3 711,44	4 039,32	4 413,58	4 743,19
(%)	72,34	71,41	71,27	72,60	71,71
b. Non Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	1 325,22	1 486,15	1 628,60	1 665,36	1 871,39
(%)	27,66	28,59	28,73	27,40	28,29
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	4 791,34	5 197,59	5 667,92	6 078,94	6 614,58
(%)	100,00	100,00	100	100	100,00
Pertumbuhan ¹² (Juta Rp)					
a. Bangunan	3,64	4,98	6,03	8,37	6,20
b. Non Bangunan	1,84	4,16	7,32	0,31	7,84
Total PMTB	3,04	4,71	6,46	5,68	6,72

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah), Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan, Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Karo
2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	737,96	780,37	652,50	740,72	760,16
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	645,99	651,81	548,02	550,74	553,47
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	4.87	4.66	3.61	3.85	3,69

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2015 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 737,96 miliar rupiah, meningkat tahun 2016 sebesar 780,37 miliar rupiah. Pada tahun 2017 perubahan inventori turun menjadi 652,50 miliar rupiah dan di tahun 2018 dan tahun 2019 naik kembali menjadi 740,72 miliar rupiah dan 760,16 miliar rupiah.

Sementara itu proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Karo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 proporsi perubahan inventori adalah 4,87 persen selanjutnya 4,66 persen (2016), 3,61 persen (2017) 3,85 persen (2018) dan 3,69 persen (2019). Pertumbuhan perubahan inventori terendah terdapat pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 3,61 persen.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Karo, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 15. Perkembangan Ekspor Kabupaten Karo 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor	3 779,72	4 059,60	4 846,40	5 360,46	5 496,53
a. ADHB (Miliar Rp)					
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3 440,59	3 607,60	3 830,19	3 883,78	3 887,38
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	24,95	24,27	26,83	27,89	26,70
Pertumbuhan (persen) ¹³	6,36	4,85	6,17	1,40	0,09

Secara total, dalam kurun waktu 2015-2019 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 3,78 triliun rupiah meningkat menjadi sebesar 4,06 triliun rupiah pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017-2019 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 4,85 triliun rupiah; 5,36 triliun rupiah; dan 5,50 triliun rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 3,44 triliun rupiah (2015); 3,61 triliun rupiah (2016); 3,83 triliun rupiah (2017); 3,88 triliun rupiah (2018); dan 3,89 triliun rupiah (2019). Sementara itu, pada periode 2015 s.d 2019, proporsi dalam PDRB mengalami fluktuasi dari 24,95 persen pada tahun 2015 menjadi 26,70 persen di tahun 2019. Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi khususnya pada tahun 2015 mencapai 6,36 persen. Sementara itu pada tahun lainnya pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 4,85 persen (2016); 6,17 persen (2017); 1,40 persen (2018); dan 0,09 persen (2019).

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga LNPRT dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Karo. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Karo di luar domestik baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Karo terhadap ekonomi atau produk wilayah lain baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Karo meningkat (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2015 s.d 2019. Pada tahun 2015 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 3,55 triliun rupiah, kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 3,73 triliun rupiah; 4,65 triliun rupiah pada tahun 2017; 5,60 triliun rupiah pada tahun 2018 dan 5,96 triliun rupiah pada tahun 2019. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2015 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 23,46 persen kemudian menurun menjadi 22,29 (2016) dan naik menjadi 25,75 persen pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018 proporsi impor barang dan jasa meningkat menjadi 29,08 persen, dan turun menjadi 28,94 persen pada tahun 2019.

**Tabel 16. Perkembangan Impor Kabupaten Karo
2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	3 555,00	3 729,33	4 651,05	5 590,10	5 958,14
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	3 121,33	3 193,52	3 317,15	3 449,27	3 481,40
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	23,46	22,29	25,75	29,08	28,94
Pertumbuhan (<i>Juta Rp</i>) ¹⁴	3,41	2,31	3,87	3,98	0,93

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

4

PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR KABUPATEN KARO

Tahun 2019 (triliun rupiah)



Perkembangan proporsi terhadap PDRB (persen)



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB, Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia,

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Karo di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas” karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan misalnya dapat dilihat dari data PDRB perkapita

**Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Karo
2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	15 150,36	16 728,42	18 064,32	19 220,88	20 584,73
- ADHK 2010	11 880,93	12 494,87	13 145,85	13 744,17	14 376,28
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	38 887,86	42 179,79	44 801,60	46 917,39	49 497,04
- ADHK 2010	30 495,90	31 505,13	32 603,23	33 548,96	34 568,50
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	3,13	3,31	3,49	2,90	3,04
Jumlah penduduk (<i>org</i>)	389 591	396 598	403 207	409 675	415 878

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor) untuk menunjang aktivitas ekonomi, Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir,

**Tabel 18. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Karo
2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	7 676,61	8 603,83	9 512,12	10 457,10	11 402,09
b. LNPRT	252,82	277,18	302,09	325,07	356,51
c. Pemerintah	1 466,92	1 539,23	1 734,35	1 848,67	1 913,00
Jumlah	9 396,35	10 420,24	11 548,56	12 630,84	13 671,60
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	15 150,36	16 728,42	18 064,32	19 220,88	20 584,73
Proporsi	62,02	62,29	63,93	65,71	66,42

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut, ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran),

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi, Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah",

Dengan menggunakan rasio ini maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit, Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 19. Incremental Capital Output Ratio
Kabupaten Karo
2015 - 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB 2010) (miliar rupiah)	15 150,36	16 728,42	18 064,32	19 220,88	20 584,73
Perubahan (miliar rupiah)	1 333,27	1 578,06	1 335,90	1 156,56	1 363,85
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	3 546,25	3 713,20	3 952,95	4 177,48	4 458,01
ICOR	2,66	2,35	2,96	3,61	3,27

<https://karokab.bps.go.id>

PERKEMBANGAN ICOR 2015-2017



ICOR = dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran)

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 s.d 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Karo pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir baik untuk tujuan konsumsi akhir investasi (fisik) maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT pemerintah dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi investasi dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk rumah tangga dan pegawai negeri) sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2015 s.d 2019 sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah indeks persentase rasio unit dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel tabungan serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri) Tabel Input-Output Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Karo terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN

<https://karokalabs.go.id>



Lampiran 1

**Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut Pengeluaran
Kabupaten Karo 2015-2019**

Miliar Rupiah

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7 676,61	8 603,83	9 512,12	10 457,10	11 402,09
a.	Makanan Minuman dan Rokok	3 680,47	4 074,99	4 457,51	4 915,63	5 399,44
b.	Pakaian dan Alas Kaki	431,47	490,65	547,18	607,65	668,12
c.	Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1 015,11	1 146,89	1 282,38	1 420,65	1 510,32
d.	Kesehatan dan Pendidikan	441,25	504,30	575,37	637,92	692,47
e.	Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	1 295,03	1 473,36	1 610,64	1 753,83	1 917,02
f.	Hotel dan Restoran	474,55	533,23	589,31	650,26	739,81
g.	Lainnya	338,73	380,41	449,73	471,16	474,90
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	252,82	277,18	302,09	325,07	356,51
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 466,92	1 539,23	1 734,35	1 848,67	1 913,00
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 791,34	5 197,59	5 667,92	6 078,94	6 614,59
a.	Bangunan	3 466,12	3 711,44	4 039,32	4 413,58	4 743,19
b.	Non-Bangunan	1 325,22	1 486,15	1 628,60	1 665,36	1 871,39
5	Perubahan Inventori	737,96	780,37	652,50	740,72	760,16
6	Ekspor	3 779,72	4 059,60	4 846,40	5 360,46	5 496,53
7	Impor	3 555,00	3 729,33	4 651,05	5 590,10	5 958,14
	PDRB	15 150,36	16 728,46	18 064,32	19 220,88	20 584,73

Lampiran 2

**Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran
Kabupaten Karo 2015-2019**

Miliar Rupiah

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6 123,45	6 468,40	6 810,77	7 215,17	7 563,65
a.	Makanan Minuman dan Rokok	2 954,30	3 096,27	3 253,85	3 471,68	3 736,50
b.	Pakaian dan Alas Kaki	334,46	356,09	374,79	398,95	423,11
c.	Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	781,73	821,91	874,08	918,42	925,76
d.	Kesehatan dan Pendidikan	369,74	394,05	418,88	444,92	452,96
e.	Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	1 019,26	1 098,36	1 153,16	1 213,26	1 238,65
f.	Hotel dan Restoran	393,59	411,64	431,87	450,06	472,06
g.	Lainnya	270,36	290,09	304,15	317,88	314,61
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	217,31	223,21	229,36	242,85	265,04
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 028,67	1 024,15	1 091,71	1 123,42	1 130,13
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 546,25	3 713,20	3 952,95	4 177,48	4 458,01
a.	Bangunan	2 366,50	2 484,40	2 634,19	2 854,64	3 031,51
b.	Non-Bangunan	1 179,75	1 228,80	1 318,76	1 322,84	1 426,50
5	Perubahan Inventori	645,99	651,81	548,02	550,74	553,47
6	Ekspor	3 440,59	3 607,60	3 830,19	3 883,79	3 887,38
7	Impor	3 121,33	3 193,52	3 317,15	3 449,27	3 481,40
	PDRB	11 880,93	12 494,87	13 145,85	13 744,17	14 376,28

Lampiran 3

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB
menurut Pengeluaran Kabupaten Karo 2015-2019**

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,67	51,43	52,66	54,40	55,39
a.	Makanan Minuman dan Rokok	24,29	24,36	24,68	25,57	26,23
b.	Pakaian dan Alas Kaki	2,85	2,93	3,03	3,16	3,25
c.	Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,70	6,86	7,10	7,39	7,34
d.	Kesehatan dan Pendidikan	2,91	3,01	3,19	3,32	3,36
e.	Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	8,55	8,81	8,92	9,12	9,31
f.	Hotel dan Restoran	3,13	3,19	3,26	3,38	3,59
g.	Lainnya	2,24	2,27	2,49	2,45	2,31
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,67	1,66	1,67	1,69	1,73
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,68	9,20	9,60	9,62	9,29
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,63	31,07	31,38	31,63	32,13
a.	Bangunan	22,88	22,19	22,36	22,96	23,04
b.	Non-Bangunan	8,75	8,88	9,02	8,66	9,09
5	Perubahan Inventori	4,87	4,66	3,61	3,85	3,69
6	Ekspor	24,95	24,27	26,83	27,89	26,70
7	Impor	23,46	22,29	25,75	29,08	28,94
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 4

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHK
2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Karo 2015-2019**

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51,54	51,77	51,81	52,50	52,61
a.	Makanan Minuman dan Rokok	24,87	24,78	24,75	25,26	25,99
b.	Pakaian dan Alas Kaki	2,82	2,85	2,85	2,90	2,94
c.	Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,58	6,58	6,65	6,68	6,44
d.	Kesehatan dan Pendidikan	3,11	3,15	3,19	3,24	3,15
e.	Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	8,58	8,79	8,77	8,83	8,62
f.	Hotel dan Restoran	3,31	3,29	3,29	3,27	3,28
g.	Lainnya	2,28	2,32	2,31	2,31	2,19
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,83	1,79	1,74	1,77	1,84
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,66	8,20	8,30	8,17	7,86
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,85	29,72	30,07	30,39	31,01
a.	Bangunan	19,92	19,88	20,04	20,77	21,09
b.	Non-Bangunan	9,93	9,83	10,03	9,62	9,92
5	Perubahan Inventori	5,44	5,22	4,17	4,01	3,85
6	Ekspor	28,96	28,87	29,14	28,26	27,04
7	Impor	26,27	25,56	25,23	25,10	24,22
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 5

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010
menurut Pengeluaran Kabupaten Karo 2015-2019**

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,58	5,63	5,29	5,94	4,83
	a. Makanan Minuman dan Rokok	6,48	4,81	5,09	6,69	7,63
	b. Pakaian dan Alas Kaki	5,46	6,47	5,25	6,45	6,06
	c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,97	5,14	6,35	5,07	0,80
	d. Kesehatan dan Pendidikan	5,09	6,58	6,30	6,22	1,81
	e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	5,01	7,76	4,99	5,21	2,09
	f. Hotel dan Restoran	4,78	4,58	4,91	4,21	4,89
	g. Lainnya	4,73	7,30	4,85	4,51	(1,03)
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(0,35)	2,72	2,75	5,88	9,14
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,03	(0,44)	6,60	2,90	0,60
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,04	4,71	6,46	5,68	6,72
	a. Bangunan	3,64	4,98	6,03	8,37	6,20
	b. Non-Bangunan	1,84	4,16	7,32	0,31	7,84
5	Perubahan Inventori	2,50	0,90	(15,92)	0,50	0,49
6	Ekspor	6,36	4,85	6,17	1,40	0,09
7	Impor	3,41	2,31	3,87	3,98	0,93
	PDRB	5,01	5,17	5,21	4,55	4,60

Lampiran 6

**Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
(2010=100) menurut Pengeluaran Kabupaten Karo 2015-2019**

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	125,36	133,01	139,66	144,93	150,75
	a. Makanan Minuman dan Rokok	124,58	131,61	136,99	141,59	144,51
	b. Pakaian dan Alas Kaki	129,00	137,79	146,00	152,31	157,91
	c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	129,85	139,54	146,71	154,68	163,14
	d. Kesehatan dan Pendidikan	119,34	127,98	137,36	143,38	152,88
	e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	127,06	134,14	139,67	144,55	154,77
	f. Hotel dan Restoran	120,57	129,54	136,46	144,48	156,72
	g. Lainnya	125,29	131,14	147,86	148,22	150,95
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	116,34	124,18	131,71	133,86	134,51
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	142,60	150,29	158,87	164,56	169,27
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	135,11	139,98	143,38	145,52	148,38
	a. Bangunan	146,47	149,39	153,34	154,61	156,46
	b. Non-Bangunan	112,33	120,94	123,49	125,89	131,19
5	Perubahan Inventori	114,24	119,72	119,07	134,50	137,35
6	Ekspor	109,86	112,53	126,53	138,02	141,39
7	Impor	113,89	116,78	140,21	162,07	171,14
	PDRB	127,52	133,88	137,41	139,85	143,19

Lampiran 7

**Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik
Regional Bruto (2010=100) menurut Pengeluaran Kabupaten Karo
2015-2019**

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,89	6,10	5,00	3,77	4,01
a.	Makanan Minuman dan Rokok	4,66	5,64	4,09	3,36	2,06
b.	Pakaian dan Alas Kaki	6,63	6,81	5,96	4,33	3,67
c.	Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,09	7,46	5,14	5,43	5,47
d.	Kesehatan dan Pendidikan	4,63	7,24	7,33	4,38	6,62
e.	Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	5,02	5,58	4,12	3,50	7,06
f.	Hotel dan Restoran	5,57	7,44	5,34	5,88	8,47
g.	Lainnya	6,63	4,67	12,76	0,24	1,84
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,52	6,74	6,07	1,63	0,49
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,09	5,39	5,70	3,58	2,86
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,80	3,60	2,44	1,49	1,96
a.	Bangunan	3,72	2,00	2,65	0,83	1,20
b.	Non-Bangunan	3,66	7,67	2,11	1,94	4,21
5	Perubahan Inventori	9,28	4,80	(0,55)	12,96	2,12
6	Ekspor	(0,69)	2,43	12,44	9,08	2,44
7	Impor	(0,14)	2,53	20,07	15,59	5,60
	PDRB	4,42	4,99	2,64	1,77	2,39

DAFTAR PUSTAKA

<https://karokab.go.id>



- 1, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo PDRB Menurut Penggunaan berbagai seri Karo,
- 2, _____ *Tanjungbalai Dalam Angka* berbagai seri Karo,
- 3, _____ *Pendapatan Nasional Indonesia* berbagai seri Jakarta,
- 4, _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat* berbagai seri Jakarta,
- 5, _____ *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998* Jakarta 1999,
- 6, Frenken Jim *How To Measure Tangible Capital Stocks* Netherlands 1992,
- 7, Host Poul Madsen *Macroeconomic Accounts An Overview* Pamphlet Series No, 29 Washington DC 1979,
- 8, Keuning, J, Steven *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia* Statistical Analysis Capability Program Project Working Paper Series No,4 Jakarta 1988,
- 9, _____ *Input-Output Table and Analysis* Studies in Methods Series F No, 14 Rev 1 New York 1973,
- 10, _____ *Handbook of National Accounting for Production* Sources and Methods Series F No, 39 New York 1986,
- 12, Verbiest Piet *Investment Matrix* Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik Jakarta 1997,
- 12, Ward Michael *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries* Paris 1976,

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KARO**

Jl. Djamin Gintings No. 112A (Raya) Berastagi
Tlp. (0628) 92675, Fax. (0628) 92851

Homepage : <http://karokab.bps.go.id> ; E-mail : bps1211@bps.go.id

